

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Deskripsi Pelaksanaan Program K3 di Kecamatan Tampan

#### 1. Kebersihan

Permasalahan kebersihan kota terutama kebersihan sampah merupakan salah satu permasalahan yang paling besar di Kecamatan Tampan, untuk saat ini permasalahan kebersihan terlihat lebih baik, walau masih ada penumpukan sampah dimana-mana terutama pada waktu pagi hari. Dalam masalah sampah diperlukan adanya sosialisasi yang baik agar warga Kecamatan Tampan tidak membuang sampah sembarangan.

Untuk Kebersihan Udara Kecamatan Tampan termasuk dalam kebersihan udara yang sedang, hal ini dikarenakan penggunaan Bahan Bakar Fosil yang semakin meningkat dikarenakan peningkatan jumlah kendaraan bermotor serta akibat pembakaran hutan di daerah Riau. Diadakannya Uji Emisi pada setiap kendaraan bermotor dirasa kurang begitu efektif, karena kendaraan di Kota Pekanbaru khususnya yang melewati Kecamatan Tampan, bukan hanya berasal dari Kota Pekanbaru saja, tetapi juga berasal dari luar kota. Selain itu kebersihan udara juga bisa disebabkan oleh asap rokok, Di Kota Pekanbaru secara umum maupun di Kecamatan Tampan belum ada tempat-tempat atau ruangan khusus merokok pada tempat-tempat publik.

Untuk Kebersihan Air, sumber air yang digunakan oleh masyarakat yang bermukim di Kecamatan Tampan berasal dari sumur galian. Kualitas air sumur di Kecamatan Tampan memang masih belum begitu baik, karena kondisi tanah

rawa. Sumber air minum produksi PDAM Tirta Siak sampai saat ini belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang bermukim di Kecamatan Tampan.

## **2. Keindahan**

Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru beserta pihak yang terkait beberapa tahun yang lalu telah melakukan penanaman dan perawatan terhadap pohon – pohon di tepi jalan mau pun sebagai pembatas jalan sebagai bagian dari penghijauan kota. Akan tetapi setelah adanya pelebaran Jl.Soekarno Hatta dan Jl.H.R.Subrantas, pohon-pohon yang ada ditebang tanpa adanya penanaman kembali, kondisi ini menyebabkan sepanjang Jalan H.R Subrantas terlihat gersang dan panas, sehingga mengakibatkan keindahan berkurang. Kemudian walau sudah dianjurkan oleh pemerintah bahwa setiap masyarakat harus menanam tanaman, apotek hidup, atau sumur resapan di pekarangan rumah, masih banyak masyarakat yang enggan melaksanakannya, bahkan ada yang mengatakan tidak mengetahui anjuran tersebut.

Saat ini di Kecamatan Tampan terlihat makin pesatnya pertumbuhan pusat-pusat perbelanjaan, sehingga lahan terbuka hijau pun makin sulit ditemukan. Hampir disetiap persimpangan dipenuhi oleh papan-papan reklame sehingga mengurangi keindahan kota. Walaupun diberlakukan beberapa kawasan bebas reklame, tetapi hingga saat ini reklame masih banyak terpampang di sepanjang banyak titik di Kota Pekanbaru. Selain itu, banyak sarana-sarana publik yang rusak di akibatkan oleh warga yang tidak bertanggung jawab, seperti telepon umum, lampu tanam, tentunya dalam hal ini pemerintah Kota Pekanbaru/

aparatus Kecamatan Tampan perlu mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepeduliannya terhadap keindahan kota.

### **3. Ketertiban**

Untuk ketertiban banyak terjadi masalah dalam pelaksanaan pengelolaan program K3. Mulai dari jalan raya di sepanjang di Simpang Empat Arengka sampai di Simpang Panam (JI Soekamo Hatta, JI Soebrantas, JI. Ringroad) dalam wilayah Kecamatan Tampan. yang sering terjadi kecelakaan di jalan raya dan kemacetan, hal ini disebabkan oleh perkembangan yang pesat tempat pemukiman serta berkembangnya prasarana pendidikan mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai Perguruan Tinggi terkonsentrasi di sekitar Jl.H.R.Subrantas, sehingga jumlah kendaraan bermotor yang melewati ruas Jalan H.R Subrantas meningkat drastis dan tidak diimbangi dengan perkembangan ruas jalan.

Pada saat ini JI Soekamo Hatta, JI Soebrantas, dan JI. Ringroad dapat dilalui oleh semua jenis kendaraan bermotor tanpa kecuali. Kondisi ini yang menyebabkan kemacetan maupun kecelakaan yang sering terjadi terutama di JI Soekamo Hatta dan JI Soebrantas. Untuk mengatasi masalah ini solusinya adalah dengan membatasi jumlah atau jenis kendaraan bermotor yang diizinkan terutama melalui jalan raya H.R Subrantas, di samping itu perlu tersedia kendaraan angkutan umum (publik) yang nyaman dan memadai seperti Bus Trans Metro. Saat ini kendaraan angkutan umum yang tersedia tidak begitu memadai, bahkan sering menambah kemacetan, karena angkutan umum sering berhenti di tempat yang tidak semestinya dengan sembarangan.

Hal yang lainnya adalah trotoar di sepanjang Jl.H.R.Subrantas semakin sempit karena digunakannya trotoar oleh banyak pedagang kaki lima untuk tempat berjualan. Setelah dikeluarkannya SK Camat tentang K3 ini memang aparat bertindak tegas dengan mengusir secara paksa PKL yang berjualan di trotoar.

Anak jalanan dan gelandangan pun masih banyak berkeliaran di jalanan atau pada *traffic- light* di Simpang Empat Jl.Soekarno Hatta dan di Simpang Empat Arengka, sehingga sering mengganggu ketertiban jalan dan masih kurangnya pembinaan terhadap tuna wisma dan gelandangan.

## **B. Analisis Pengelolaan Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (K3)**

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada masalah penelitian dalam latar belakang masalah bahwa terciptanya lingkungan yang bersih, indah dan tertib adalah tujuan dari pembangunan, dengan lingkungan yang selaras tersebut dapat menjadikan suasana lingkungan yang harmonis dan mencerminkan budaya yang tinggi serta kehidupan yang bersahaja, untuk mencapai itu semua maka di Kecamatan Tampan telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk SK Camat untuk panduan pelaksanaan program K3 di wilayah Kecamatan Tampan. Untuk melihat bagaimana pelaksanaan pengelolaan K3 di Kecamatan Tampan dapat dilihat dari penjabaran berikut ini :

### **1. Kebersihan**

Kebersihan adalah tercipta dan terpeliharanya suatu kondisi lingkungan yang sehat dan senang dipandang mata, dimulai dari lingkungan rumah tangga sampai seluruh wilayah Kecamatan. Indikator kebersihan disini adalah :

1. Tidak terdapatnya sampah/kotoran/limbah dilingkungan rumah tangga, pertokoan, perkantoran, tempat-tempat usaha dan fasilitas umum.
2. Tidak tercemar dan tersumbatnya drainase/ saluran air.
3. Tidak terdapat kotoran limbah dilingkungan usaha/industry yang tidak tertangani.
4. Berfungsinya seluruh perangkat, sarana dan prasarana kebersihan.

Pada indikator kebersihan dalam kuesioner diwakili oleh 4 pertanyaan yang merupakan sub indikator dari kebersihan. Untuk mengetahui tentang tanggapan responden terhadap setiap sub indikator kebersihan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1. Tanggapan Responden Tentang Kebersihan di Kecamatan Tampan**

No	Kebersihan	Tanggapan Responden			Jumlah
		Baik (%)	Cukup Baik (%)	Kurang Baik (%)	
1.	Pengelolaan sampah/kotoran/limbah dilingkungan rumah tangga, pertokoan, perkantoran, tempat-tempat usaha dan fasilitas umum.	19	21	60	100
2.	Kegiatan gotong-royong untuk membersihkan drainase/ saluran air	17	31	52	100
3.	Pengelolaan sampah/limbah industry	21	42	37	100
4.	Sarana dan prasarana kebersihan	23	33	44	100
Jumlah		80	127	193	400
Rata-rata %		20	32	48	100

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011.

Dari hasil Tabel 1 dapat dilihat bahwa 60% dari responden memberikan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kebersihan di Kecamatan Tampan adalah kurang baik. Hal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan kebersihan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari program K3 belum terlaksana dengan baik. Pelaksanaan pengelolaan kebersihan yang dilakukan di

Kecamatan Tampan baik itu pengelolaan sampah/limbah kotoran rumah tangga/toko, pengelolaan limbah industri dan kelengkapan sarana dan prasarana dalam melaksanakan kebersihan dinilai kurang baik, hal ini disebabkan karena petugas sering terlambat dalam mengangkut sampah yang ada dilingkungan masyarakat.

Kemudian hasil penelitian yang dilakukan tentang pelaksanaan kegiatan gotong royong untuk membersihkan saluran air/drainase yang dilakukan di Kecamatan Tampan sebanyak 52% menyatakan bahwa kurang baik, hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di sekitarnya.

Berdasarkan hasil keseluruhan tanggapan responden pelaksanaan pengelolaan kebersihan yang ditinjau dari 4 sub indikator dalam upaya mencapai tujuan program K3 disimpulkan adalah kurang baik, dengan persentase 48%. Hal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan kebersihan masih kurang baik. Dimana dalam upaya tersebut, baik petugas maupun masyarakat melaksanakan kebersihan dengan kurang baik.

Kota Pekanbaru mendapatkan piala Adipura Kencana untuk kategori Kota besar. Piala ini merupakan penghargaan bagi kota ini yang sudah mengawali prestasi kota sebagai kota terbersih selama tujuh tahun berturut-turut. Prestasi yang gemilang ini tentu amat membanggakan Kota Pekanbaru. Tapi, tunggu dulu kebanggaan terhadap adipura itu sementara kita simpan. Hujan deras yang mengguyur Kota Pekanbaru beberapa hari belakangan ini, membuat kita kembali

mempertanyakan benarkah kota ini sudah berhasil dalam pengelolaan dalam lingkungan?

Akibat hujan deras itu, air meluap deras menggenangi hampir seluruh ibu kota. Bahkan di beberapa kantor instansi pemerintah, genangan air cukup tinggi. Curah hujan yang menggenangi beberapa wilayah kota ini, jelas sangat mengganggu warga. Dimana terjadi kemacetan lalu lintas di beberapa ruas jalan penting serta ancaman untuk factor kesehatan.

Salah satu penyebab terjadinya banjir dikota ini, tak lain kurang berfungsinya drainase disini. Beberapa pengamat bahkan mengungkapkan, ironisnya ada sejumlah kawasan di kota ini tidak memiliki drainase. Wajar, jika terjadi hujan lebat air yang meluap tidak dapat diserap. Meskipun begitu masyarakat tidak dapat membebaskan kesalahan ini kepada instansi yang bertanggung jawab. Peran masyarakat sesungguhnya sangat penting. Perilaku tak bertanggung jawab sebagian kota ini sangat kita sayangkan. Misalnya saja sampah yang dibuang ke selokan dan juga sepanjang jalan yang di tumpuk- tumpuk, ini juga salah satu penyebab terjadinya banjir.

Masalah banjir yang terus terjadi di kota- kota besar saat ini termasuk di Kota Pekanbaru jelas memerlukan penanganan serius. Baik oleh pemerintah maupun masyarakat tidak bias membiarkan masalah tersebut berlama- lama,kerjasama timbale balik antara warga dan pemerintah disini sangat diperlukan.

Dulu ketika terjadi banjir dikota ini, penyebabnya adalah akibat meluapnya Sungai Siak yang dikarenakan kiriman banjir dari Sumatra Barat yang

letaknya lebih tinggi. Dan pekanbaru merupakan kawasan yang ikut terkena dampaknya. Tapi sekarang tidak demikian, banjir di Kota Pekanbaru karena memang kurang berfungsinya drainase, sebab sekalipun di Sumatra Barat tidak hujan tetapi Pekanbaru tetap digenangi air bila hujan datang. Untuk itu kita berharap kepada pemerintah, disini agar bersikap tegas dalam menanggulangi banjir dengan serius. Cepatnya genangan air muncul selain akibat buruknya drainase juga karena pengelolaan sumur resapan di sejumlah wilayah di kota ini masih buruk. Bahkan ada wilayah yang tidak memiliki sumur resapan.

Pesatnya pembangunan kota sekarang diyakini ikut membuat daerah resapan air semakin minim. Karena itu dinas terkait seperti dinas tata kota dan dinas pekerjaan umum harus lebih memperhatikan persoalan sumur resapan ini dalam mengeluarkan izin mendirikan Bangunan (IMB) sehingga kondisi kota selain tertata dengan baik juga bisa menghindari banjir yang datang setiap kali hujan. Dinas tata kota dan pekerjaan umum jangan hanya sekedar memberikan izin dengan cepat namun perlu juga melakukan pengawasannya dengan baik, khususnya masalah daerah resapan air sehingga saluran –saluran air dapat berfungsi dengan baik sehingga dapat mengatasi banjir.

Disamping itu sekretaris Komisi I DPRD Kota Pekanbaru mengatakan bahwa penyebab banjir dikota ini adalah pola penataan kota yang dinilai sembraut, tanpa memperhatikan system pembuangan primer dan sekunder. Hasilnya, baru sebentar saja hujan beberapa kawasan seperti Tampan, Arengka telah tergenang air. dikatakan bencana musiman yang hamper terjadi setiap tahun yang dialami sebagian warga kota. Sampingnya persoalan ini sampai sekarang

belum juga terselesaikan, makanya diharapkan masyarakat lebih memperhatikan pembangunan dan kebersihan lingkungan dan kepada dinas terkait harus lebih aktif lagi dalam menanggulangi persoalan seperti ini sehingga kedepan banjir tidak terjadi lagi.

## **2. Keindahan.**

Keindahan adalah tercipta dan terpeliharanya suatu kondisi lingkungan yang tertata rapi, asri dan teduh mencerminkan nilai seni mulai dari lingkungan rumah tangga sampai seluruh wilayah kecamatan. Keindahan yang dimaksud adalah :

1. Terdapatnya tanaman atau taman yang terpelihara pada setiap rumah tangga, pertokoan, perkantoran, tempat-tempat usaha dan fasilitas umum.
2. Adanya nilai-nilai seni terutama seni budaya melayu pada setiap bangunan terutama perkantoran dan pertokoan.
3. Tidak terdapatnya bangunan liar didaerah milik jalan dan ditempat-tempat yang dilarang pemerintah.
4. Adanya penerangan yang memadai pada setiap pekarangan rumah, perkantoran, pertokoan, tempat-tempat usaha, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Pada indikator keindahan dalam kuesioner diwakili oleh 4 pertanyaan yang merupakan sub indikator dari keindahan. Untuk mengetahui tentang tanggapan responden terhadap setiap sub indikator keindahan dapat dilihat pada table-tabel berikut ini :

**Tabel 2. Tanggapan Responden Tentang Keindahan di Kecamatan Tampan**

No	Keindahan	Tanggapan Responden			Jumlah
		Baik (%)	Cukup Baik (%)	Kurang Baik (%)	
1.	Pemanfaatan pekarangan rumah/toko untuk tanaman	42	35	23	100
2.	Penerapan nilai seni pada bangunan	40	21	40	100
3.	Ketaatan masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan liar	23	46	31	100
4.	Penerangan yang memadai pada setiap bangunan	58	19	23	100
Jumlah		163	121	117	400
Rata-rata %		41	30	29	100

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011.

Dari hasil Tabel 2 dapat dilihat bahwa 41 % dari responden memberikan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan keindahan di Kecamatan Tampan adalah baik. Hal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan keindahan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari program K3 sudah dilaksanakan dengan baik. Dimana pelaksanaan pengelolaan keindahan yang dilakukan di kecamatan Tampan baik itu pemanfaatan pekarangan untuk taman, penerangan yang memadai dinilai baik. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan tentang pelaksanaan pengelolaan keindahan yang dilakukan di Kecamatan Tampan sebanyak 30 % dari responden menanggapi pelaksanaan pengelolaan keindahan dalam mencapai tujuan program K3 adalah cukup baik. Selanjutnya sebanyak 29 % mengatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan keindahan adalah kurang baik, hal ini disebabkan kurangnya penerapan nilai-nilai seni terutama seni melayu pada bangunan yang ada, serta masih banyak masyarakat yang mendirikan bangunan liar di daerah yang dilarang pemerintah seperti pada badan jalan.

Berdasarkan hasil keseluruhan tanggapan responden pelaksanaan pengelolaan keindahan yang ditinjau dari 4 sub indikator dalam upaya mencapai tujuan program K3 disimpulkan adalah baik, dengan persentase 41 %. Hal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan keindahan sudah dilakukan dengan baik. Dimana dalam upaya tersebut, baik petugas maupun masyarakat telah melaksanakan program keindahan dengan baik.

### **3. Ketertiban.**

Ketertiban adalah tercipta dan terpeliharanya suatu kondisi lingkungan kehidupan yang harmonis, damai, nyaman dan aman serta sadar dan taat hukum.

Ketertiban yang dimaksud adalah :

1. Dapat meminimalisir tindak kejahatan serta adanya upaya preventif terhadap tindak kejahatan dan penyakit masyarakat.
2. Tertanamnya disiplin disetiap individu mulai dari lingkungan keluarga, tempat kerja maupun organisasi-organisasi sebagai wujud dari budaya yang bermoral tinggi.
3. Tidak terdapatnya pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur ketertiban seperti tentang mendirikan bangunan, tempat berjualan, tempat hiburan dan lain-lain.
4. Berfungsinya seluruh perangkat, sarana dan prasarana ketertiban.

Pada indikator ketertiban didalam kuesioner diwakili oleh 4 pertanyaan yang merupakan sub indikator dari ketertiban. Untuk mengetahui tentang tanggapan responden terhadap setiap sub indikator ketertiban dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

**Tabel 3. Tanggapan Responden Tentang Ketertiban di Kecamatan Tampan**

No.	Ketertiban	Tanggapan responden			Jumlah
		Baik (%)	Cukup Baik (%)	Kurang Baik (%)	
1.	Tindakan pemerintah untuk meminimalisir tindak kejahatan.	37	42	21	100
2.	Komunikasi dan silaturahmi antara sesama warga	25	44	31	100
3.	Kepatuhan masyarakat tentang pengurusan Izin Mendirikan Bangunan	31	48	21	100
4.	Fungsi sarana, prasarana dan perangkat dari ketertiban	31	25	44	48
Jumlah		124	159	117	400
Rata-rata %		31	40	29	100

Sumber: Hasil Penelitian lapangan 2011.

Dari hasil Tabel 3 dapat dilihat bahwa 40 % dari responden memberikan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan ketertiban di Kecamatan Tampan adalah cukup baik. Hal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan ketertiban yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari program K3 sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Dimana pelaksanaan pengelolaan ketertiban yang dilakukan di Kecamatan Tampan baik itu komunikasi dan silaturahmi antara sesama warga, tindakan pemerintah untuk meminimalisir tindak kejahatan sudah cukup baik. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan tentang pelaksanaan pengelolaan ketertiban yang dilakukan di Kecamatan Tampan sebanyak 31 % dari responden menanggapi pelaksanaan pengelolaan ketertiban dalam mencapai tujuan program K3 adalah baik. Selanjutnya sebanyak 29 % mengatakan bahwa pelaksanaan pengelolan ketertiban adalah kurang baaik. Hal ini disebabkan karena

sarana dan prasarana perangkat ketertiban seperti Siskamling dan kegiatan ronda malam yang kurang berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil keseluruhan tanggapan responden pelaksanaan pengelolaan ketertiban yang ditinjau dari 4 sub indicator dalam upaya mencapai tujuan program K3 dinyatakan cukup baik, dengan persentase 40 %. Hal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan ketertiban sudah dilakukan dengan cukup baik. Dimana dalam upaya tersebut, baik petugas maupun masyarakat telah melaksanakan ketertiban dengan cukup baik.

Hasil keseluruhan penelitian terhadap indikator variabel pelaksanaan pengelolaan K3 di Kecamatan Tampan, dapat dilihat dalam tabel rekapitulasi berikut ini :

**Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3) di Kecamatan Tampan**

No.	Indikator	Kriteria Tanggapan Responden			Jumlah
		Baik (%)	Cukup Baik (%)	Kurang Baik (%)	
1.	Kebersihan	20	32	48	100
2.	Keindahan	41	30	29	100
3.	Ketertiban	31	40	29	100
Jumlah		92	102	106	400
Rata-rata %		31	34	35	100

Sumber: Data olahan 2011.

Dari hasil rekapitulasi tanggapan responden tentang Pelaksanaan Pengelolaan K3 di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ternyata hasil keseluruhan yang didapatkan kurang baik, dengan persentase 35 %. Hal ini menjelaskan bahwa Pelaksanaan Pengelolaan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru masih kurang baik.

Pelaksanaan kebersihan di Kecamatan Tampan dinilai kurang baik, hal ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan kebersihan masih ditemukan adanya ketidaksesuaian antara peraturan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya, seperti pengelolaan sampah dilingkungan rumah tangga maupun di daerah pertokoan belum terlaksana dengan baik, keterlambatan petugas/armada pengangkut sampah menjadi kendala dalam pengelolaan kebersihan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong-royong menyebabkan banyaknya drainase yang tersumbat sehingga menyebabkan sering terjadi banjir, selain itu kekurangan sarana dan prasarana kebersihan juga menyebabkan pengelolaan kebersihan belum terlaksana dengan baik, penyediaan tong sampah maupun bak-

bak sampah dilingkungan masyarakat belum maksimal, banyak dari pertokoan maupun perumahan masyarakat yang tidak memiliki tong sampah.

Pelaksanaan pengelolaan keindahan yang telah dilaksanakan di kecamatan Tampan dinilai sudah baik, hal ini dapat dilihat dari adanya pemanfaatan halaman rumah untuk tanaman hias atau bunga, kemudian penerangan yang ada dirumah masyarakat atau pertokoan juga menambah keindahan, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan keindahan sudah terlaksana dengan baik. Mengenai pelaksanaan ketertiban di Kecamatan Tampan diketahui sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari kepatuhan masyarakat dalam mengurus izin pada saat mendirikan bangunan, tindakan pemerintah dalam meminimalisir terjadinya tindak kejahatan dinilai sudah cukup baik.

## **I. Identifikasi Aspek Penunjang Pelaksanaan Perda/SK tentang K3**

### **a. Identifikasi Kebijakan Pendukung Pelaksanaan Perda/SK tentang K3**

Kebijakan pendukung yang memiliki substansi hukum yang sebenarnya diimplementasikan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kebersihan, keindahan dan ketertiban. Namun pada kenyataan kebijakan pendukung yang ada juga tidak diimplementasikan secara benar sehingga aturan yang ada berbeda dengan kenyataan di lapangan. Seperti penataan reklame yang sudah ditetapkan kawasan bebas reklame Masalah PKL juga belum diatur secara khusus sehingga masih ada PKL yang berjualan sembarangan.

### **b. Identifikasi Aspek Masyarakat dalam Pelaksanaan Perda /SK tentang K3**

Tanggapan masyarakat yang berada di Kecamatan Tampan tentang pelaksanaan program K3 disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 5. Tanggapan Masyarakat di Kecamatan Tampan tentang Pelaksanaan Program K3**

No.	Item	Tanggapan responden			Jumlah
		Tinggi (%)	Sedang (%)	Rendah (%)	
1.	Pengetahuan	28	63	9	100
2.	Persetujuan	56	41	3	100
3.	Kesiapan	62	30	8	100
Jumlah		146	134	20	300
Rata-rata %		49	45	6	100

Sumber: Data olahan 2011.

Dari tanggapan responden tentang pelaksanaan program K3 di Kecamatan Tampan berada dari dalam kategori sedang dan tinggi, hanya 6 % dari responden yang memberikan tanggapan dalam kategori rendah. Pada Tabel 5 terlihat bahwa pengetahuan responden tergolong sedang yaitu sebesar 63 %. Persetujuan responden tentang pelaksanaan K3 tergolong tinggi yaitu sebesar 56% dan kesiapan untuk menaati tergolong tinggi yaitu sebesar 62 %.

Berdasarkan hasil tersebut maka disimpulkan bahwa hasil penelitian mengenai tanggapan responden menunjukkan tanggapan yang baik dalam rangka menyambut penyelenggaraan SK Camat tentang Panduan Pelaksanaan K3. Namun terdapat catatan yang harus diingat bahwa dalam proses sosialisasi terlihat bahwa tingkat pengetahuan yang masih sedang maka pemerintah belum maksimal dalam melakukan sosialisasi.

### **c. Identifikasi Aspek Kelembagaan dalam Pelaksanaan Perda /SK tentang K3**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam penegakkan Perda ketertiban, kebersihan dan keindahan dan dibantu oleh perangkat pemerintah lainnya termasuk pemerintah kecamatan, selain itu instansi lain yang langsung bertanggung jawab atas permasalahan ketertiban, kebersihan dan keindahan diantaranya:

□ Dinas sosial Kota Pekanbaru merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam penanganan masalah tunas sosial di Kota Pekanbaru namun dalam SK tentang tim sosialisasi dan pemantauan tidak dicantumkan. Dalam usahanya untuk menangani permasalahan gelandangan, pengemis dan pengamen, dinas sosial masih memiliki keterbatasan, dalam hal ini belum memiliki panti sosial khusus bagi tuna sosial di Kota Pekanbaru. Hal ini akan berpengaruh negatif dalam penyelenggaraan ketertiban di Kota Pekanbaru karena pertumbuhan tuna sosial yang semakin pesat setiap tahun yang mengakibatkan tumbuhnya tuna sosial di jalan Kota Pekanbaru.

□ Perusahaan daerah keberhasilan Kota Pekanbaru merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam penanganan masalah sampah. Upaya yang dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan keberhasilan seperti menggerakkan staff penyapu. Namun dalam pelaksanaan belum ada jadwal yang jelas mengenai penyapuan yang dilakukan.

□ Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam penataan reklame. Namun berdasarkan ketentuan yang ada tentang

penetapan titik reklame maka terlihat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah seperti memberikan ijin penempatan reklame dikawasan bebas reklame.

#### **d. Identifikasi Aspek Infrastruktur dalam Pelaksanaan Perda /SK tentang K3**

Fasilitas persampahan untuk mendukung penyelenggaraan kebersihan terlihat belum proposional dengan panjang jalan, karena tidak sesuai dengan jumlah ideal yang ada yaitu jarak 50 m harus disediakan 1 tempat sampah. Selain itu tempat sampah yang tersedia terdapat satu tempat untuk dua jenis sampah padahal sampah organik dan anorganik perlu dipisahkan sejak dalam pembuangannya sehingga mudah dalam pengelolaannya.

## **II. Evaluasi Pelaksanaan Perda /SK tentang K3**

Hasil evaluasi pelaksanaan SK Camat tentang K3 yang dilihat dari perspektif kebijakan pendukung, masyarakat, kelembagaan dan infrastruktur disajikan pada tabel dan uraian berikut.

### **1. Evaluasi Pelaksanaan Ketentuan Kebersihan**

Hasil evaluasi pelaksanaan aturan kebersihan yang dilihat dari aspek kebijakan pendukung, aspek masyarakat, aspek kelembagaan dan aspek infrastruktur disajikan berikut ini.

- Dalam aturan tentang kawasan bebas merokok belum ada diberikan sanksi kepada perokok yang melanggar aturan. Sedangkan penanggung jawab hanya diwajibkan untuk menyediakan tempat merokok tetapi tidak

memberikan denda berupa denda. Aturan ini menunjukkan ketidakseimbangan hukum. Padahal di beberapa negara maju dan beberapa kota di Indonesia pembebanan biaya diberikan kepada perokok dan pemilik tempat umum sehingga dapat memberikan efek jera. Selain itu juga aturan peran penanggung jawab tempat umum belum secara lengkap diatur. Aturan ini diperlakukan karena penanggungjawab tempat umum merupakan aparat yang paling berperang dalam penegakkan.

- Aturan tentang buang sampah sembarangan belum diatur tentang aparat yang berhak melakukan teguran. Karena tukang sapu dapat diberikan kewenangan untuk melakukan pemantauan atau memberikan sanksi sehubungan dengan terbatasnya jumlah personil Satpol PP untuk melakukan pemantauan secara insentif.

**Tabel 6. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Aturan Kebersihan dari Aspek Kebijakan Pendukung dan Aspek Masyarakat**

Item	Aspek Kebijakan Pendukung		Aspek Masyarakat	
	Perda/SK	Kebijakan Terkait	Kebersihan di Kec.Tampian	Perilaku
Bersih Udara	Melarang untuk merokok di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa merokok Memberikan denda jika melanggar			Perilaku masyarakat yang melanggar aturan kawasan tanpa merokok adalah sedang.
Bersih sampah	Melarang buang sampah sembarangan. Mamberikan denda jika melanggar.	Sampah jalan dan tempat umum adalah tanggungjawab pemerintah dan harus dilakukan penyapuan, pengakutan dan pengolahan.	Sampah yang timbul di jalan-jalan Kec.Tampian akibat kegiatan PKL dan sampah buangan sembarangan.	Perilaku masyarakat yang melanggar aturan bersih sampah yaitu buang sampah sembarangan sedang.

Sumber: Data olahan 2011.

**Tabel 7. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Aturan Kebersihan dari Aspek Kelembagaan dan Aspek Infrastruktur**

Item	Aspek Kelembagaan		Aspek Infrastruktur
	Aparat Penegak	Aparat Penanggung Jawab	
Bersih udara	Dalam Perda K3 belum jelas mengenai aparat penegak yang akan melakukan pemantauan dan yang berwenang memberikan sanksi bagi pelanggar.	Tidak ada aturan tentang tanggung jawab petugas dari tempat umum atau sarana umum yang dimaksud sebagai kawasan tanpa merokok.	
Bersih sampah	Belum ada penegakan secara tegas oleh aparat dalam hal buang sampah.	Petugas kebersihan bertanggungjawab menyapu sampah di jalanan, namun belum ada jadwal yang tetap karena hanya dilakukan pada waktu tertentu saja.	Fasilitas tempat sampah yang ada belum sesuai dengan penempatan ideal sehingga membuat masyarakat buang sampah sembarangan.

--	--	--	--

Sumber: Data olahan 2011.

## **2. Evaluasi Pelaksanaan Ketentuan Keindahan**

Hasil evaluasi pelaksanaan aturan keindahan yang dilihat dari aspek kebijakan pendukung, aspek masyarakat, aspek kelembagaan dan aspek infrastruktur disajikan berikut ini.

Aturan tentang tempelan sembarangan kertas reklame/brosur belum didukung oleh kebijakan pendukung yang mengatur tentang tempat penetapan jenis reklame selebaran dan brosur. Jenis reklame ini juga memiliki izin dari pemerintah sehingga perlu penetapan tempat yang memadai.

**Tabel 8. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Aturan Keindahan dari Aspek Kebijakan Pendukung dan Aspek Masyarakat**

Item	Aspek Kebijakan Pendukung		Aspek Masyarakat	
	Perda /SK K3	Kebijakan Terkait	Keindahan di Kec.Tampar	Perilaku
Menyebarkan atau menempelkan selebaran	melarang menertibkan memberikan sanksi	Dalam kebijakan tentang penyelenggaraan reklame, jenis reklame selebaran atau brosur ada namun belum diatur secara detail mengenai tempat khusus untuk penempatannya sehingga ditempelkan secara sembarangan.	Tempelan kertas reklame/brosur terdapat di sarana prasarana umum seperti gardu listrik, lampu penerangan jalan, di dinding toko/ruko dan lain sebagainya.	Perilaku yang melanggar aturan tentang menyebarkan selebaran adalah rendah.
Bersih sampah	melarang menertibkan memberikan sanksi		Coretan atau gambar terdapat beberapa titik yang menjadi pusat-pusat pergerakan seperti jembatan layang, bangunan dan lain sebagainya.	Perilaku yang melanggar aturan tentang menyebarkan selebaran adalah rendah.

Sumber: Data olahan 2011.

**Tabel 9. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Aturan Keindahan dari Aspek Kelembagaan dan Infrastruktur**

Item	Aspek Kelembagaan		Aspek Infrastruktur
	Aparat Penegak	Aparat Penanggung Jawab	
Menyebarkan atau menempelkan selebaran	Belum dilakukan penerbitan oleh Satpol PP Kec Tampan		
Bersih sampah	Belum dilakukan penerbitan oleh Satpol PP Kec.Tampan		Belum tersedia bak/tempat penampungan sampah sementara

Sumber: Data olahan 2011.

### 3. Evaluasi Pelaksanaan Ketentuan Ketertiban

Hasil evaluasi pelaksanaan aturan ketertiban yang dilihat dari aspek kebijakan pendukung, aspek masyarakat, aspek kelembagaan dan aspek infrastruktur disajikan berikut ini.

#### **Evaluasi Pelaksanaan Aturan Ketertiban dari Perspektif Kebijakan Pendukung**

Terlihat di Jl.Soekarno Hatta dan Jl.H.R.Subrantas masih terdapat kegiatan PKL yang beraktivitas di atas trotoar atau badan jalan. Dari perspektif kebijakan pendukung, kondisi ini di akibatkan oleh aturan tentang pedagang kaki lima (PKL) hanya melarang tetapi tidak menunjuk tempat atau lokasi yang layak bagi pada pedagang yang ditertibkan untuk berjualan sehingga tidak kembali lagi beraktivitas di trotoar atau jalan. Sedangkan kebijakan pendukung PKL, belum ada sinkronisasi antara Perda /SK tentang K3 dengan kebijakan pendukung yang dapat menyelesaikan permasalahan dasar karena memiliki aturan yang lebih detail

dalam melakukan penataan. Tetapi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui pemerintah melalui kebijakan pendukung terlihat belum ada kebijakan khusus tentang penataan PKL sehingga kondisi ini membuat pelaksanaan Perda/SK tentang K3 tidak akan efektif.

Aturan gelandangan, pengemis dan pengamen yang akan dilakukan pembinaan belum mencantumkan berapa lama para gelandangan dan pengemis tersebut dilakukan pembinaan di Panti Sosial. Lama pembinaan gelandangan dan pengemis yang tidak jelas akan membuat mereka kembali lagi beraktivitas. Sedangkan untuk kebijakan pendukung penanganan masalah kesejahteraan Kota Pekanbaru belum didukung oleh implementasi Perda yang konsisten. Gelandangan, pengemis dan pengamen merupakan tanggung jawab pemerintah untuk ditampung di Panti Sosial dan memberi perhatian. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan pendukung yang dapat menyelesaikan masalah juga tidak efektif sehingga aturan K3 yang hanya melarang tidak akan efektif.

**Tabel 5. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Aturan Ketertiban dari Aspek Kebijakan Pendukung**

Item	Aspek Kebijakan Pendukung	
	Perda /SK K3	Kebijakan Terkait
Tertib Pedagang Kaki Lima (PKL)	<input type="checkbox"/> Aturan K3 hanya melarang dan menertibkan sehingga diperlukan kebijakan pendukung yang mampu menyelesaikan permasalahan PKL <input type="checkbox"/> Tidak semua PKL ditertibkan tetapi dapat memberikan ijin ditempat tertentu tetapi kebijakan yang mengatur tentang perijinan yang dimaksud juga belum ada.	<input type="checkbox"/> Kebijakan pendukung yang ada juga memiliki substansi yang sama yaitu melarang dan menertibkan <input type="checkbox"/> Belum ada kebijakan khusus mengenai penataan PKL <input type="checkbox"/> Upaya penataan PKL di Jl.Soekarno-Hatta, dan Jl.H.R.Subrantas tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang baik.

Tertib menyeberang jalan	<input type="checkbox"/> Mewajibkan untuk menggunakan sarana penyeberangan yang ada <input type="checkbox"/> Sarana penyeberangan di peruntukkan bagi pejalan kaki.	
Tertib gelandangan, pengemis dan pengamen	<input type="checkbox"/> Melarang <input type="checkbox"/> Menertibkan <input type="checkbox"/> Menyenggarakan pendidikan, pembinaan dan pelatihan	<input type="checkbox"/> Pemerintah berkewajiban untuk melakukan rujukan ke panti sosial <input type="checkbox"/> Memberi perhatian namun masih ada gelandangan, pengemis banyak yang berkelipahan.

Sumber: Data olahan 2011.

### **Evaluasi Pelaksanaan Aturan Ketertiban dari Perspektif Masyarakat**

#### **a. Kondisi ketertiban, kebersihan dan keindahan di Jl.Soekarno-Hatta, Jl.H.R Subrantas, Jl.Ring Road**

Kondisi ketertiban, kebersihan dan keindahan terlihat masih terganggu Titik-titik yang diidentifikasi seperti simpang empat arengka dan simpang Panam. Titik ini terdapat kegiatan liar seperti pengamen, pengemis dan pasar tumpah yang mengganggu K3. ini karena intensitas kegiatan kawasan sekitar cukup tinggi karena merupakan jalan yang diakses menuju pusat Kota Pekanbaru.

Selain itu, berdasarkan karakteristik lokasi, keberadaan gelandangan, pengamen dan coretan serta tempelan kertas sangat mengganggu nilai estetika kota.

#### **b. Pengetahuan, tindakan dan perilaku responden di Jl.Soekarno-Hatta, Jl.H.R Subrantas, Jl.Ring Road**

Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pemberlakuan Perda K3 /SK K3 akan berpengaruh pada perilaku masyarakat. Masih terlihat perilaku negatif atau menunjukkan masih kurangnya sosialisasi. Dari beberapa perilaku negatif yang melanggar aturan K3 dapat dikatakan bahwa tingkat pelanggaran

yang akan sulit untuk ditertibkan adalah menyeberang sembarangan dan buang sampah sembarangan. Hal ini akan sangat sulit untuk melakukan pemantauan karena melibatkan seluruh masyarakat sebagai calon pelanggar dan juga tergantung pada tingkat kesadaran masyarakat sehingga diperlakukan pendekatan yang tepat, serta lokasinya yang tidak tentu. Tingkat pelanggaran yang rendah seperti mencoret dan menyebarkan selebaran dapat diminimalisir dengan melakukan pemantauan atau pengawasan secara intensif karena pelanggaran seperti ini hanya terjadi di titik-titik tertentu saja.

**Tabel 6. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Aturan Ketertiban dari Aspek Masyarakat**

Item	Aspek Masyarakat	
	Ketertiban di Jl. Soekarno Hatta, H.R. Subrantas	Perilaku
Tertib pedagang kaki lima (PKL)	Ada kegiatan yang melanggar aturan seperti: <input type="checkbox"/> Pedagang asongan <input type="checkbox"/> Pedagang gerobak dan pedagang yang mendirikan tenda diatas Trotoar	Perilaku masyarakat yang melanggar aturan yaitu berjualan di atas trotoar atau badan jalan adalah sedang
Tertib menyeberang jalan	Terdapat 1 sarana jembatan penyeberangan dan <i>zebra cross</i> yang tersedia di persimpangan Jl. Soekarno hatta-Jl. Tuanku Tambusai namun belum berfungsi, penyeberangan sembarangan tetap berada diluar kendali aparat.	Perilaku menyeberang jalan sembarangan yang tinggi menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat.
Tertib gelandangan, pengemis dan pengamen	Kegiatan gelandangan, pengemis dan pengamen terlihat beraktivitas secara bebas di persimpangan jalan Arengkadan bundaran Mal SKA	

### **Evaluasi Pelaksanaan Aturan Ketertiban dari Perspektif Kelembagaan**

Dalam penegakkannya belum secara penuh aturan K3 ditegakkan dan baru dari beberapa diantaranya. Seperti penertiban kegiatan PKL, gelandang, pengemis dan pengamen, tertib menyeberang, tertib tuna susila namun tidak efektif karena belum secara jelas dan rinci tentang aturan pengawasan. Pelaksanaan pengawasan masih lemah sehingga fakta dilapangan menunjukkan pelanggaran yang terjadi diluar kendali aparat. Aktivitas PKL, gelandangan dan pengemis kembali beraktivitas karena Satpol PP memiliki keterbatasan personil.. Sedangkan elemen pemerintah kecamatan hanya dapat memberikan penyuluhan dan bimbingan yang tidak diimbangi oleh kesadaran masyarakat sehingga dalam pelaksanaan panduan tentang program K3 tidak efektif.

### **Evaluasi Pelaksanaan Aturan Ketertiban dari Perspektif Infrastruktur**

Dari hasil penelitian mengenai infrastruktur dalam hal ini fasilitas umum yang tersedia di Kecamatan Tampan menunjukkan bahwa belum memenuhi kriteria yang ada. Fasilitas penyeberangan seperti jembatan penyeberangan belum tersedia sama sekali. Seperti terlihat di Simpang Empat Arengka, simpang Purwodadi Indah, dimana pada kawasan tersebut sangat ramai dilewati oleh kendaraan bermotor dan pejalan kaki, akan menimbulkan tingkat pelanggaran tertib jalan yang semakin tinggi.

**Tabel 7. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Aturan Ketertiban dari Aspek Kelembagaan dan Aspek Infrastruktur**

Item	Aspek Kelembagaan			Aspek Infrastruktur
	Perilaku	Aparat Penegak	Aparat Penanggung Jawab	
Tertib pedagang kaki lima (PKL)	Perilaku masyarakat yang melanggar aturan yaitu berjualan di atas trotoar atau badan jalan adalah sedang	<input type="checkbox"/> Satpol PP sudah melakukan penertiban ditujuh titik namun masih ada PKL <input type="checkbox"/> Di Jl.H.R Subrantas Pemerintah Kecamatan sudah melakukan sosialisasi penyuluhan tetapi masih ada pelanggaran <input type="checkbox"/> Kelemahan dalam pemantauan juga teridentifikasi bahwa belum ada aturan pendukung petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis <input type="checkbox"/> Serta kurangnya personil untuk dapat memantau beberapa lokasi secara bersamaan.		
Tertib menyeberang jalan	Perilaku menyeberang jalan sembarangan yang tinggi menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat.	<input type="checkbox"/> Satpol PP sudah melakukan penertiban namun masih belum efektif karena kurangnya pengawasan yang tepat karena perilaku menyeberang jalan terbukti diluar kendali aparat <input type="checkbox"/> Pengawasan yang dilakukan juga belum didukung aturan pendukung berupa petunjuk		Sarana penyeberangan yang tersedia belum memadai .

		pelaksanaan dan petunjuk teknis di lapangan.		
Tertib gelandangan, pengemis dan pengamen		<input type="checkbox"/> Satpol PP sudah melakukan penertiban namun masih tetap ada karena kurangnya pengawasan. <input type="checkbox"/> Pemerintah kecamatan juga ikut melakukan sosialisasi dan penyuluhan langsung di lapangan tapi kegiatan liar masih tetap beraktivitas karena kurangnya pengawasan secara intensif.	Perda K3 mengatakan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan tetapi instansi penanggung jawab (Dinas Sosial) belum memiliki sarana Panti Sosial yang memadai, sedangkan jumlah PMKS semakin tinggi termasuk gelandangan, pengemis dan pengamen.	



### **C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengelolaan program Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru**

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan Program K3 di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ditemukan ada beberapa factor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pengelolaan Program K3, dimana faktor-faktor tersebut adalah:

#### **1. Komunikasi**

Suatu kebijakan tidak akan pernah berhasil bila kebijakan tersebut tidak disosialisasikan atau dikomunikasikan karena pelaksanaan kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Pemerintah telah melakukan sosialisasikepada masyarakat mengenai program kebersihan, keindahan dan ketertiban, namun sosialisasi ini dinilai masih belum maksimal, kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah tentang pelaksanaan program K3 dan terbatasnya sarana/media yang digunakan oleh pemerintah dalam mensosialisasikan program K3 membuat masyarakat tidak begitu paham dengan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah sehingga pelaksanaan K3 belum terlaksana dengan baik.

#### **2. Sumber Daya**

Ketersediaan sumberdaya adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tersedianya sumber daya manusia atau pelaksananya yang melaksanakan program K3. Dengan ketersediaan sumber daya yang memadai, maka kita dapat melihat keberhasilan pelaksanaan program K3. Banyak dari masyarakat yang tidak tahu bahwa dalam mencapai tujuan dari program K3 dibutuhkan peran serta masyarakat dalam pengaplikasian program K3 tersebut.

#### **3. Sikap Pelaksana / Disposisi**

Sikap pelaksana adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sejauh manaa sikap pelaksana dalam melaksanakan pengelolaan program K3. Kesadaran akan sifat pribadi yang terdapat diantara pekerja sangat penting artinya, karena pekerja yang berbeda membiarkan tanggapan dengan cara yang berbeda pula atas

usaha-usaha manajemen untuk usaha yang diarahkan ke tujuan dengan pengetahuan ini maka manajemen dapat menyesuaikan rancangan mereka terhadap pengorganisasian dan kepemimpinan atas pekerja dalam pekerjaan dan dengan demikian meningkatkan kesempatan bekerja sama, memperbesar dukungan bersama untuk sasaran organisasi.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan struktur pelaksana program yang dapat menunjang terlaksananya suatu kebijakan, struktur birokrasi yang dimaksud dilihat dari dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan K3, struktur organisasi yang melaksanakan program K3 dan adanya pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan program K3.

#### 5. Faktor Dominan yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengelolaan Program Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3) di Kecamatan Tampan.

Ketersediaan sumberdaya manusia merupakan hal yang sangat penting didalam melaksanakan pengelolaan K3 tanpa adanya sumberdaya yang baik maka pelaksanaan K3 tidak akan bias berjalan dengan baik atau maksimal karena sumber daya adalah faktor yang sangat mempengaruhi pelaksanaan program K3. Dalam hal ini penulis menginterpretasikannya ke dalam tiga indikator, yaitu: Jumlah Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, dan Kewenangan yang dimiliki petugas didalam pelaksanaan pengelolaan kebersihan, keindahan dan ketertiban. Ketersediaan sumberdaya menjadi faktor dominan karena dapat berkaitan dengan kinerja dari aparat pemerintah terkait.